

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen.

Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward/pelayan*) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai *agent*. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Menurut Morgan et al. (1996) manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai *steward* daripada *agent* yang

menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Van Slyke (2006) juga menyatakan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori *stewardship* diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Kualitas Laporan keuangan

1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta

materi penjas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Sanjaya, 2017).

Kualitas adalah suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas Laporan Keuangan agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu Roviyantje (2011). Laporan Keuangan yang berkualitas mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, informasi harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang, semakin tajam gambaran yang disajikan lewat data financial, maka semakin mendekati kebenaran Ernawati (2019).

2. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

B. Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

C. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

D. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menjelaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer bertujuan untuk memperlancar arus informasi dan

untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami (Mentari, 2016).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi (Laudon, 2014). Berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan membuat pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan juga memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Teknologi

informasi merupakan gambaran dari setiap teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), elektronik *commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000). Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi berupa alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik, maka pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi Setyowati (2016). Menurut Sukirno (2006) Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud ialah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan diberbagai kegiatan dalam perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan suatu bisnis. Keberadaan sumber daya ini merupakan suatu keharusan bagi setiap bisnis.

Manusia dalam keberadaannya pada suatu bisnis memegang peranan yang sangat penting, baik dalam pelaksanaan maupun dalam pencapaian target dari bisnis itu sendiri (Sanjaya, 2017).

Le Deist dan Winterton (2005) menjelaskan bahwa kompetensi menjadi faktor kunci yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan dalam bersaing (*competitive advantage*). Di sektor publik sebagaimana pada sektor swasta, perkembangan kompetensi dianggap sebagai faktor utama didalam produktivitas dan kemampuan bersaing. Kegagalan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi tentang pemerintahan. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas Roviyantie (2011).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi,

2013). Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut UU No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sanjaya, 2017). Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 4, pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian

dalam organisasi secara keseluruhan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal yang sehat.

2. Penilaian resiko

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 13, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang ada. Penilaian dari risiko meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko.

3. Kegiatan pengendalian

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18 ayat 1, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan Pengendalian terdiri dari review kinerja instansi pemerintah, pembinaan sdm, pengendalian pengelolaansistem informasi, pengendalian fisik asset, penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumber daya, dan dokumentasi sistem pengendalian intern.

4. Informasi dan komunikasi

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan hal tersebut secara efektif dengan cara menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi,

mengelola mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 43, pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan sebagai landasan informasi, bahan acuan, dan perbandingan (*Riset Gap*) dalam penelitian ini. Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Ni Wayan Sudiarti, Gede Juliarsa, 2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD	Variabel independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	1. Adanya pengaruh positif antara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas laporan keuangan LPD Kabupaten Klungkung (+) 2. Adanya pengaruh positif antara locus of control dengan kualitas laporan keuangan LPD Kabupaten Klungkung (+)

2	(Euis Mardiyatul Fauziyah, 2019)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi (pada organisasi perangkat daerah di kota serang)	Variabel independen : penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (+) 2. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (-) 3. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang (-)
3	(Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka, 2018)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD kota tangerang selatan	Variabel independen : standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (+) 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (+) 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (+)

4	(I Gusti Ngurah Siwambudi, Gerianta Wirawan Yasa, I Dewa Nyoman Badera 2017)	Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sdm dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan	<p>Variabel independen : Kompetensi sdm dan Sistem pengendalian intern</p> <p>Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (-) 2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (+) 3. Interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan (-) 4. Interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan (-)
5	(Aditya Sanjaya, 2017)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan	<p>Variabel independen : Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia</p> <p>Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (+) 2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (+) 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (+) 4. Sumber Daya Manusia berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (-)

		komitmen organisasi sebagai pemoderasi (studi pada skpd kabupaten kampar)	Variabel Moderasi: Komitmen organisasi	
6	(Abdullah Taman, 2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Variabel independen : kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. (+) 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY (+) 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY (+)
7	(Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah, 2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)	Variabel independen : kualitas aparatur daerah, pemanfaatan TI, dan pengawasan keuangan daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (+) 2. Kualitas pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (+) 3. Kualitas pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (+)

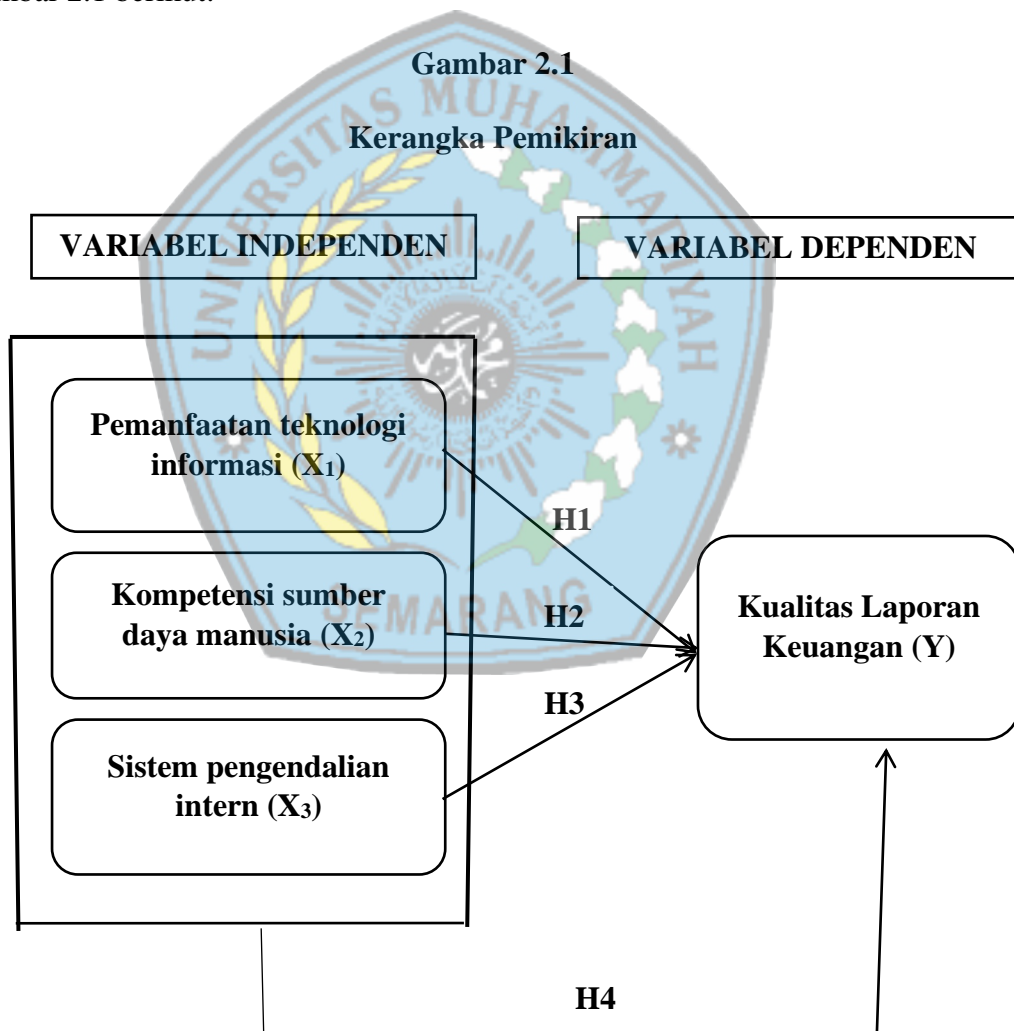
8	(Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh, 2017)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Variabel independen : Sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (-) 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (+)
9	(Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi, 2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang	Variabel independen : Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. (-) 2. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan (+) 3. Internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan (+)
10	(Nur Laila Yuliani, Rahmawati Dwi Agustini, 2016)	Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemanfaatan teknologi informasi, Kompetensi sumber daya manusia,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (+) 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (+) 3. Kompetensi sumber daya manusia tidak

			<p>Penerapan standar akuntansi pemerintahan, Sistem Pengendalian intern</p> <p>Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (-)</p> <p>4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (-)</p> <p>5. Sistem Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (-)</p>
--	--	--	--	---



2.3 Kerangka Pemikiran

Suatu kerangka pemikiran dikemukakan untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan Variabel Dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan. Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Sumber: Data diolah penulis, 2020

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wardiana (2002) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategi untuk pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang memperkuat hal ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) dan Efendi (2017) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wirawan (2009: 1) sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya lainnya yang akan menjadi pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Untary (2015) menjelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya. Sejalan dengan penelitian Sudiarti (2020) dan Taman (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai jika pelaksanaan penyusunannya sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Arens, Elder & Beasley (2008) pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan informasi laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi (2017) membuktikan bahwa penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Rahmawati (2018) dan Sanjaya (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan.

2.4.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kemajuan teknologi yang pesat maka dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah Selain itu, sistem pengendalian intern juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan atas kualitas atau keandalan informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.